
**POLITIK IDENTITAS DALAM ERA DIGITAL DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP STABILITAS SOSIAL DAN
INTEGRASI NASIONAL**

Ali Akbar ¹, Armi Fauzi ², Gusman Harizal ³

¹²³ Program Studi Ilmu Politik, Universitas Nasional, Indonesia
aliakbar665@gmail.com¹, armifauzi176@gmail.com²,
harizal.gusman11@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika politik identitas dalam era digital serta implikasinya terhadap stabilitas sosial dan integrasi nasional. Perkembangan media digital mengubah cara identitas politik dibentuk, disebarkan, dan dikonsolidasikan dalam masyarakat. Identitas tidak lagi statis, tetapi diproduksi secara dinamis melalui interaksi di media sosial yang dipengaruhi algoritma dan preferensi pengguna. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode systematic literature review untuk menganalisis temuan empiris dan teoretis yang relevan. Data diperoleh dari sumber ilmiah bereputasi dan dianalisis menggunakan teknik content analysis serta thematic analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media digital berperan signifikan dalam memperkuat politik identitas melalui personalisasi konten yang menciptakan echo chamber dan mempercepat polarisasi sosial. Politik identitas meningkatkan mobilisasi politik dan partisipasi masyarakat, namun juga memperkuat eksklusivitas kelompok dan memicu konflik sosial. Dalam konteks integrasi nasional, fragmentasi identitas menjadi tantangan utama dalam membangun kohesi sosial yang inklusif. Penelitian ini menegaskan sifat ambivalen politik identitas sebagai sumber konflik sekaligus sarana pemberdayaan. Diperlukan pendekatan komprehensif melalui literasi digital, regulasi disinformasi, dan kebijakan inklusif untuk menjaga stabilitas sosial. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan platform digital menjadi kunci utama.

Kata Kunci: Politik Identitas, Media Digital, Polarisasi Sosial, Stabilitas Sosial, Integrasi Nasional

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah secara fundamental cara individu membangun, mengekspresikan, dan mengartikulasikan identitas politik. Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, menciptakan ruang baru bagi interaksi politik yang lebih terbuka, cepat, dan luas. Dalam konteks ini, identitas tidak lagi terbentuk secara statis melalui institusi tradisional, tetapi diproduksi secara dinamis melalui interaksi digital yang intens dan berulang. Media sosial berfungsi sebagai arena utama dalam pembentukan identitas politik, di mana individu dan kelompok dapat membangun narasi, memperkuat solidaritas, serta mengartikulasikan kepentingan kolektif secara langsung (Cerqueira & Martins, 2023; Vico, 2020). Fenomena ini memperlihatkan bahwa identitas politik tidak hanya menjadi ekspresi sosial, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mobilisasi politik di era digital.

Dalam perkembangannya, politik identitas menjadi salah satu karakteristik utama dalam dinamika politik kontemporer, baik di tingkat global maupun nasional. Politik identitas merujuk pada praktik politik yang didasarkan pada afiliasi kelompok tertentu seperti agama, etnis, gender, atau ideologi. Di Indonesia, fenomena ini semakin menguat dalam kontestasi politik elektoral, terutama dalam pemilu dan pilkada, di mana identitas digunakan sebagai alat untuk membangun loyalitas politik dan mengonsolidasikan dukungan massa (Susanto et al., 2025; Haviz, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa politik identitas telah menjadi strategi yang efektif dalam mempengaruhi perilaku pemilih, meskipun pada saat yang sama berpotensi menimbulkan fragmentasi sosial.

Peran teknologi digital dalam memperkuat politik identitas tidak dapat diabaikan. Algoritma media sosial cenderung mempersonalisasi konten berdasarkan preferensi pengguna, sehingga menciptakan ruang gema atau echo chamber yang memperkuat pandangan yang sudah ada. Kondisi ini mempersempit ruang dialog dan meningkatkan potensi polarisasi sosial (Zainab, 2025). Selain itu, penyebaran disinformasi berbasis identitas semakin masif, terutama melalui penggunaan bot politik dan manipulasi konten digital, yang memperburuk kualitas

diskursus publik (Latifa, 2023; Rego, 2018). Dalam situasi ini, identitas tidak hanya menjadi alat mobilisasi, tetapi juga menjadi sumber konflik yang memperdalam perpecahan sosial.

Dampak politik identitas terhadap stabilitas sosial menjadi isu yang semakin krusial. Polarisasi berbasis identitas dapat menciptakan ketegangan sosial yang berkelanjutan dan mengganggu harmoni masyarakat. Studi menunjukkan bahwa meningkatnya keterikatan pada identitas kelompok dapat mendorong munculnya sikap eksklusif dan intoleran terhadap kelompok lain (White, 2024; Kossowska et al., 2023). Dalam konteks Indonesia yang multikultural, kondisi ini menjadi tantangan serius karena dapat mengancam kohesi sosial dan stabilitas nasional. Selain itu, penyebaran ideologi radikal dan intoleransi melalui platform digital semakin memperburuk situasi, terutama di kalangan generasi muda yang sangat aktif dalam ruang digital (Setiawan et al., 2024; Falah & Matroni, 2025).

Lebih lanjut, politik identitas juga memiliki implikasi signifikan terhadap integrasi nasional. Integrasi nasional menuntut adanya kesamaan visi, solidaritas sosial, dan kepercayaan antar kelompok dalam masyarakat. Namun, politik identitas yang eksklusif dapat melemahkan ikatan tersebut dengan memperkuat batas-batas kelompok dan menciptakan segregasi sosial. Fragmentasi identitas yang diperkuat oleh media digital dapat mengikis konsensus nasional dan menghambat proses integrasi sosial (Huang, 2024; Moleka, 2024). Bahkan, munculnya identitas mikro yang sangat spesifik dapat memperumit proses pembentukan identitas nasional yang inklusif (Jann, 2020; Carter, 2006).

Meskipun demikian, politik identitas tidak selalu berdampak negatif. Dalam beberapa konteks, politik identitas dapat menjadi sarana pemberdayaan bagi kelompok marginal yang selama ini kurang terwakili dalam sistem politik. Melalui media digital, kelompok-kelompok ini dapat menyuarakan aspirasi mereka, membangun jaringan solidaritas, dan memperjuangkan hak-hak mereka secara lebih efektif (Susanto et al., 2025; Martorelli, 2016). Selain itu, keterlibatan politik yang meningkat melalui platform digital juga dapat memperkuat kesadaran sipil dan partisipasi demokratis, khususnya di kalangan generasi muda (Putri et al., 2024; Gao, 2025). Dengan demikian, politik identitas memiliki dua sisi yang saling

bertolak belakang, yaitu sebagai sumber konflik sekaligus sebagai alat pemberdayaan sosial.

Namun demikian, kajian mengenai politik identitas dalam era digital masih menunjukkan sejumlah keterbatasan. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung fokus pada dampak politik identitas terhadap polarisasi sosial atau peran media sosial dalam membentuk identitas, tanpa mengintegrasikan kedua aspek tersebut secara komprehensif (White, 2024; Haviz, 2026). Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam mengkaji hubungan antara mekanisme algoritmik dalam media digital dengan dinamika kohesi sosial dan integrasi nasional (Zainab, 2025). Studi yang menggabungkan perspektif global dan lokal, khususnya dalam konteks Indonesia, juga masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi melalui pendekatan yang lebih integratif dan multidimensional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara komprehensif dinamika politik identitas dalam era digital serta implikasinya terhadap stabilitas sosial dan integrasi nasional. Penelitian ini mengajukan beberapa rumusan masalah utama, yaitu bagaimana politik identitas berkembang dalam ekosistem digital, bagaimana peran media digital dalam membentuk dan memperkuat identitas politik, serta bagaimana implikasinya terhadap stabilitas sosial dan integrasi nasional. Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif teoretis dan empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara politik identitas dan dinamika sosial dalam konteks digital.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan tiga dimensi utama, yaitu politik identitas, ekosistem digital, dan stabilitas sosial serta integrasi nasional. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung parsial, penelitian ini berupaya untuk mengembangkan kerangka analisis yang komprehensif dengan mengaitkan berbagai faktor yang saling berinteraksi dalam membentuk dinamika politik identitas. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan interdisipliner yang menggabungkan perspektif

politik, komunikasi, dan sosiologi, sehingga dapat memberikan analisis yang lebih holistik dan kontekstual.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai politik identitas dalam era digital dengan menawarkan model konseptual yang menjelaskan hubungan antara media digital, identitas politik, dan kohesi sosial. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif politik identitas, seperti polarisasi dan konflik sosial, serta memperkuat aspek positifnya, seperti partisipasi politik dan inklusivitas sosial. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam upaya menjaga stabilitas sosial dan memperkuat integrasi nasional di tengah dinamika digital yang semakin kompleks.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk mengkaji secara mendalam dinamika politik identitas dalam era digital serta implikasinya terhadap stabilitas sosial dan integrasi nasional. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional, khususnya dalam konteks interaksi antara teknologi digital dan konstruksi identitas politik. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfokus pada deskripsi fenomena, tetapi juga pada interpretasi makna dan hubungan antar variabel yang terlibat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur sistematis (*systematic literature review*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan dari berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, serta repository ilmiah yang memiliki kredibilitas tinggi. Sumber data mencakup studi global dan nasional, sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap fenomena politik identitas dalam era digital (White, 2024; Susanto et al., 2025).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi pustaka dengan menggunakan kriteria seleksi yang ketat. Kriteria tersebut meliputi relevansi topik dengan politik identitas, keterkaitan dengan era digital, serta fokus pada implikasi terhadap stabilitas sosial dan integrasi nasional. Selain itu, sumber yang dipilih harus berasal dari publikasi ilmiah yang terindeks dan memiliki kualitas akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses seleksi dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi.

Dalam tahap analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang menggabungkan content analysis dan thematic analysis. Analisis konten dilakukan untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama yang muncul dalam literatur, seperti identitas politik, media digital, polarisasi sosial, dan integrasi nasional. Sementara itu, analisis tematik digunakan untuk mengelompokkan temuan-temuan tersebut ke dalam kategori yang lebih spesifik, sehingga memudahkan dalam proses interpretasi dan sintesis data.

Tahapan analisis dilakukan secara bertahap dan sistematis. Pertama, peneliti mengidentifikasi konsep-konsep kunci yang relevan dengan topik penelitian. Kedua, peneliti mengkategorikan temuan berdasarkan tema-tema utama, seperti peran media digital dalam konstruksi identitas, dampak politik identitas terhadap stabilitas sosial, serta implikasinya terhadap integrasi nasional. Ketiga, peneliti melakukan sintesis antar studi untuk menemukan pola, hubungan, dan perbedaan yang signifikan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan analisis yang mendalam dan terstruktur.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan temuan dari berbagai konteks, baik global maupun nasional. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana dinamika politik identitas dapat berbeda tergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik masing-masing negara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran umum, tetapi juga analisis yang kontekstual dan relevan.

Kerangka analisis dalam penelitian ini didasarkan pada hubungan antara empat variabel utama, yaitu politik identitas, media digital, stabilitas sosial, dan

integrasi nasional. Media digital diposisikan sebagai variabel yang mempengaruhi konstruksi identitas politik melalui mekanisme algoritmik dan interaksi sosial. Politik identitas kemudian mempengaruhi stabilitas sosial melalui dinamika polarisasi dan konflik, serta berdampak pada integrasi nasional melalui proses kohesi atau fragmentasi sosial (Zainab, 2025; Huang, 2024). Kerangka ini digunakan sebagai dasar dalam menganalisis dan menginterpretasikan data.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi dari konteks yang berbeda. Selain itu, konsistensi analisis dijaga dengan menggunakan kerangka teoretis yang telah mapan dalam kajian politik identitas dan komunikasi digital. Kredibilitas data juga diperkuat dengan memilih sumber-sumber yang berasal dari jurnal ilmiah bereputasi dan publikasi akademik terpercaya.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan data sekunder sehingga tidak dapat menangkap dinamika empiris secara langsung di lapangan. Kedua, fokus penelitian terbatas pada politik identitas dalam era digital, sehingga tidak mencakup aspek lain seperti ekonomi politik atau kebijakan publik secara mendalam. Ketiga, analisis terhadap mekanisme teknis algoritma digital tidak dilakukan secara mendalam, melainkan hanya pada implikasi sosialnya.

Dengan pendekatan metodologis yang sistematis dan komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dinamika politik identitas dalam era digital serta implikasinya terhadap stabilitas sosial dan integrasi nasional.

C. PEMBAHASAN

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa politik identitas dalam era digital berkembang melalui interaksi kompleks antara teknologi, aktor politik, dan dinamika sosial. Transformasi digital tidak hanya mengubah cara komunikasi politik berlangsung, tetapi juga membentuk ulang struktur identitas kolektif dalam masyarakat. Media sosial berfungsi sebagai ruang utama produksi identitas, di mana individu dan kelompok membangun representasi diri yang bersifat politis, terfragmentasi, dan sering kali bersifat antagonistik terhadap kelompok lain. Dalam

konteks ini, identitas tidak lagi sekadar atribut sosial, tetapi menjadi instrumen strategis yang digunakan untuk memobilisasi dukungan dan membentuk opini publik (Cerqueira & Martins, 2023; Clemente et al., 2024).

Analisis menunjukkan bahwa salah satu karakteristik utama politik identitas di era digital adalah meningkatnya personalisasi identitas melalui algoritma media sosial. Algoritma bekerja dengan menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, sehingga menciptakan lingkungan informasi yang homogen. Kondisi ini memperkuat keyakinan yang sudah ada dan mengurangi paparan terhadap perspektif yang berbeda. Fenomena ini dikenal sebagai *echo chamber*, yang berkontribusi pada meningkatnya polarisasi sosial (Zainab, 2025). Dalam lingkungan seperti ini, identitas kelompok menjadi semakin kaku dan eksklusif, sehingga memperbesar potensi konflik sosial.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas dalam era digital sangat dipengaruhi oleh strategi komunikasi politik yang berbasis pada emosi dan simbolisme identitas. Aktor politik memanfaatkan isu-isu sensitif seperti agama, etnis, dan ideologi untuk membangun kedekatan emosional dengan pemilih. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan loyalitas politik, namun pada saat yang sama memperkuat garis pemisah antar kelompok (Tumanggor & Azhar, 2025; Susanto et al., 2025). Dalam konteks Indonesia, penggunaan narasi identitas dalam kontestasi politik elektoral menunjukkan bahwa politik identitas telah menjadi bagian integral dari strategi kampanye modern.

Selain itu, penyebaran disinformasi berbasis identitas menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk dampak politik identitas. Disinformasi sering kali dirancang untuk memperkuat stereotip negatif terhadap kelompok tertentu dan memicu ketegangan sosial. Penggunaan teknologi seperti bot politik dan manipulasi konten digital mempercepat penyebaran informasi yang tidak akurat, sehingga sulit dikendalikan (Latifa, 2023). Dalam situasi ini, masyarakat menjadi rentan terhadap manipulasi informasi, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas sosial dan memperlemah kepercayaan terhadap institusi demokrasi.

Dari perspektif stabilitas sosial, hasil analisis menunjukkan bahwa politik identitas dalam era digital memiliki dampak yang signifikan terhadap

meningkatnya polarisasi sosial. Polarisasi ini ditandai dengan terbentuknya kelompok-kelompok yang memiliki pandangan politik yang sangat berbeda dan cenderung tidak toleran terhadap perbedaan. Studi menunjukkan bahwa keterikatan yang kuat terhadap identitas kelompok dapat mendorong munculnya sikap eksklusif dan bahkan permusuhan terhadap kelompok lain (White, 2024; Kossowska et al., 2023). Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengganggu harmoni sosial dan meningkatkan potensi konflik.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dampak politik identitas terhadap stabilitas sosial tidak selalu bersifat negatif. Dalam beberapa kasus, politik identitas dapat meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran sosial, terutama di kalangan kelompok yang sebelumnya kurang terwakili. Media digital memberikan ruang bagi kelompok marginal untuk menyuarakan aspirasi mereka dan terlibat dalam proses politik secara lebih aktif (Putri et al., 2024; Gao, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa politik identitas memiliki potensi untuk memperkuat demokrasi, asalkan dikelola secara inklusif dan tidak eksklusif.

Dalam kaitannya dengan integrasi nasional, hasil analisis menunjukkan bahwa politik identitas dalam era digital memiliki implikasi yang kompleks. Di satu sisi, politik identitas dapat memperkuat solidaritas dalam kelompok tertentu, namun di sisi lain dapat melemahkan kohesi sosial secara keseluruhan. Fragmentasi identitas yang diperkuat oleh media digital dapat menghambat proses pembentukan identitas nasional yang inklusif (Huang, 2024). Selain itu, munculnya identitas mikro yang sangat spesifik dapat memperumit upaya untuk membangun konsensus nasional yang luas (Jann, 2020).

Fenomena ini diperkuat oleh temuan bahwa media sosial tidak hanya membentuk identitas individu, tetapi juga menciptakan ruang interaksi yang memfasilitasi pembentukan komunitas berbasis identitas. Komunitas ini sering kali bersifat eksklusif dan tertutup terhadap pandangan yang berbeda, sehingga memperkuat fragmentasi sosial (Vico, 2020). Dalam konteks ini, integrasi nasional menjadi tantangan yang semakin kompleks karena masyarakat cenderung terfragmentasi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki identitas yang berbeda.

Lebih jauh, hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik identitas dalam era digital juga dipengaruhi oleh faktor kepercayaan terhadap informasi. Kepercayaan terhadap sumber informasi menjadi faktor kunci dalam membentuk persepsi dan sikap politik individu. Studi menunjukkan bahwa individu yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap konten digital cenderung memiliki identitas nasional yang lebih kuat (Gao, 2025). Sebaliknya, rendahnya kepercayaan terhadap informasi dapat memperkuat fragmentasi sosial dan menghambat integrasi nasional.

Dalam perspektif teoritis, temuan ini memperkuat pandangan bahwa politik identitas dalam era digital merupakan fenomena yang bersifat ambivalen. Di satu sisi, politik identitas dapat menjadi sumber konflik dan fragmentasi sosial, namun di sisi lain dapat menjadi sarana pemberdayaan dan partisipasi politik. Ambivalensi ini menunjukkan bahwa dampak politik identitas sangat bergantung pada konteks sosial, politik, dan teknologi yang melingkupinya.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa peran negara dan institusi sosial sangat penting dalam mengelola dampak politik identitas. Kebijakan yang mendorong literasi digital, transparansi algoritma, dan regulasi terhadap penyebaran disinformasi dapat membantu mengurangi dampak negatif politik identitas (Zainab, 2025). Selain itu, pendekatan berbasis inklusivitas dan dialog antar kelompok dapat memperkuat kohesi sosial dan mendukung integrasi nasional (Moleka, 2024).

Dalam konteks Indonesia, penguatan nilai-nilai kebangsaan seperti toleransi dan keberagaman menjadi kunci dalam menghadapi tantangan politik identitas. Pendekatan berbasis ideologi nasional dapat membantu membangun identitas kolektif yang inklusif dan mengurangi potensi konflik berbasis identitas (Falah & Matroni, 2025). Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan platform digital diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat dan mendukung stabilitas sosial.

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan politik identitas harus dilakukan secara komprehensif dan multidimensional. Pendekatan yang hanya berfokus pada regulasi tidak cukup untuk mengatasi

kompleksitas fenomena ini. Diperlukan pendekatan yang menggabungkan edukasi, teknologi, dan kebijakan publik untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan stabilitas sosial. Literasi digital menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memahami dan menyaring informasi yang beredar di media sosial.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menekankan pentingnya peran platform digital dalam mengelola konten yang berkaitan dengan identitas. Platform digital memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa algoritma yang digunakan tidak memperkuat polarisasi sosial. Transparansi dalam pengelolaan algoritma dan pengawasan terhadap konten yang bersifat provokatif dapat membantu mengurangi dampak negatif politik identitas (Zainab, 2025).

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa politik identitas dalam era digital merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki implikasi yang luas terhadap stabilitas sosial dan integrasi nasional. Dampak politik identitas tidak bersifat tunggal, tetapi bergantung pada berbagai faktor yang saling berinteraksi, termasuk teknologi, aktor politik, dan kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti untuk mengelola dinamika politik identitas secara efektif.

Temuan ini juga menegaskan bahwa masa depan stabilitas sosial dan integrasi nasional sangat bergantung pada kemampuan masyarakat dan negara dalam mengelola dinamika politik identitas dalam era digital. Dengan pendekatan yang tepat, politik identitas tidak hanya dapat diminimalkan dampaknya, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkuat demokrasi dan inklusivitas sosial.

D. PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa politik identitas dalam era digital berkembang sebagai fenomena yang kompleks dan dinamis, dipengaruhi oleh interaksi antara teknologi, aktor politik, dan struktur sosial masyarakat. Media digital berperan penting dalam membentuk dan memperkuat identitas politik melalui mekanisme personalisasi konten yang cenderung menciptakan ruang informasi yang homogen. Kondisi ini mendorong terbentuknya polarisasi sosial

yang semakin tajam, di mana individu dan kelompok menguatkan keyakinan masing-masing tanpa ruang dialog yang memadai.

Dampak politik identitas terhadap stabilitas sosial terlihat dari meningkatnya fragmentasi dan eksklusivitas kelompok. Keterikatan yang kuat terhadap identitas tertentu dapat memicu sikap intoleran dan memperbesar potensi konflik sosial. Namun, di sisi lain, politik identitas juga memiliki potensi positif sebagai sarana pemberdayaan kelompok marginal dan peningkatan partisipasi politik. Hal ini menunjukkan bahwa politik identitas tidak dapat dipahami secara tunggal sebagai ancaman, tetapi juga sebagai peluang dalam memperkuat demokrasi jika dikelola secara inklusif.

Dalam konteks integrasi nasional, politik identitas menghadirkan tantangan serius. Fragmentasi identitas yang diperkuat oleh media digital dapat menghambat pembentukan kohesi sosial dan melemahkan konsensus nasional. Masyarakat cenderung terpecah ke dalam kelompok-kelompok berbasis identitas yang semakin spesifik, sehingga menyulitkan terbentuknya identitas kolektif yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis untuk menjaga keseimbangan antara ekspresi identitas dan kepentingan integrasi nasional.

Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan multidimensional dalam mengelola politik identitas di era digital. Penguatan literasi digital, regulasi terhadap disinformasi, serta pengembangan kebijakan yang mendorong inklusivitas menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan platform digital sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat. Dengan pendekatan yang tepat, politik identitas dapat diarahkan menjadi kekuatan yang mendukung stabilitas sosial dan memperkuat integrasi nasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Carter, L. (2006). Integration by Degrees: Blood, politics and identity. *AlterNative: An International Journal of Indigenous Peoples*, 3(1), 233-237. <https://doi.org/10.1177/117718010600300113>
- Cerqueira, G. S., & Martins, I. C. (2023). Quais são as estratégias de construção de vínculo e identidade política dos atores políticos, especialmente aquelas que

- se utilizam de recursos tecnológicos, na era digital: uma revisão. *Revista Inclusiones*, 10(4), 158-174. <https://doi.org/10.58210/fprc3488>
- Clemente, A., Handzlik, D., Jones, J. J., & Skiena, S. S. (2024). Online identities are increasingly political: evidence from 30 countries. *OSF*. https://doi.org/10.31235/osf.io/68zjx_v1
- Falah, M., & Matroni, M. (2025). Pancasila sebagai living ideology: Strategi deradikalisasi dan penguatan toleransi di tengah arus globalisasi digital. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(3). <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.6013>
- Gao, Y. (2025). When Trust Meets Identity: How Social Media Shapes Taiwanese National Belongings in the Digital Age. *University of Chicago*. <https://doi.org/10.6082/uchicago.15765>
- Haviz, F. (2026). Anatomi Kontroversi “Board of Peace”: Tinjauan Multidimensi Terhadap Kebijakan Presiden Prabowo. *KIPS-Jurnal Kajian Islam Politik dan Sosial*, 2(1), 46-55. <https://doi.org/10.65980/journalkips.v2i1.109>
- Huang, J. (2024). *The digital fabric of nationalism: How social media weaves banal nationalism into everyday life*. *Advances in Social Behavior Research*, 8, Article 74. <https://doi.org/10.54254/2753-7102/8/2024074>
- Jann, O. (2020). „You can check out, but you can never leave.“–Identitätsräume zwischen Entgrenzung und Begrenzung. *Gibt es eine kulturelle Identität?*, 99-124. <https://doi.org/10.5771/9783845297934>
- Kossowska, M., Kłodkowski, P., Siewierska-Chmaj, A., Guinote, A., Kessels, U., Moyano, M., & Strömbäck, J. (2023). Internet-based micro-identities as a driver of societal disintegration. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 1-10. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02441-z>
- Latifa, D. R. (2023). Politisasi identitas dalam pemilu. *Tasyri'*, 4(2). <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.377>
- Martorelli, P. D. (2016). *Mobilization and Its Discontents: Identity Politics in the Age of Identity Critique*. *Doctoral dissertation, University of California, Berkeley*.
- Moleka, P. (2024). Redefining social cohesion: Fostering inclusion and belonging in diverse societies. *International Journal of Languages and Culture*, 4(2), 78-88. <https://doi.org/10.51483/IJLC.4.2.2024.78-88>
- Putri, M. D., Susanti, E., & Santri, L. (2024). Analisis dampak perilaku online Gen Z terhadap identitas kewarganegaraan dalam era digital. *Jurnal Khatulistiwa*, 4(2). <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i2.3300>
- Rego, R. (2018). Identity, alterity and social media: Coercing silence. *Journal of Dharma*, 43(1), 85-110

- Setiawan, B., Setiawan, B., Hidayat, E. R., & et al. (2024). Tantangan dan strategi pencegahan konflik akibat intoleransi dan radikalisme di era digital. *JISIP*. 13(3). <https://doi.org/10.33366/jisip.v13i3.3087>
- Susanto, S., Abra, E. H., & Hadiyanto, A. (2025). Dinamika politik identitas dalam pemilu 2024: Tantangan bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*. 8(3). <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12697>
- Tumanggong, T., & Azhar, A. A. (2025). Politik identitas dalam ruang demokrasi Indonesia: Dinamika, strategi, dan implikasinya terhadap kohesi sosial. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*. 6(2). <https://doi.org/10.63447/jimik.v6i2.1436>
- Vico, S. (2020). 'Globalized difference': Identity politics on social media. *Journal of global diaspora & media*, 1(1), 55-70. https://doi.org/10.1386/gdm_00004_1
- White, H. J. (2024). Role of populism, polarization, social media, and identity politics in shaping the contemporary political landscape of the United States of America. *Social Science Chronicle* 4(1). 1-6. <https://doi.org/10.56106/ssc.2024.009>
- Zainab, H. (2025). Algorithmic Identity and the Fragmentation of Cultural Consensus: Exploring the Politics of Belonging and Social Cohesion in AIMediated Societies. *International Journal of Politics, Culture, and Society (IJPCS)*, 2(1), 1-9. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15608656>